PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (PAS)

Mata Pelajaran : PKN Tahun Pelajaran : 2019/2020

Kelas/Semester : X MIPA-IPS/1 Hari/Tanggal :

SOAL PAS 1 PKN KELAS 10 40+ SOAL PG DAN ESAY

PETUNJUK PENGERJAAN

- 1. Isikan identitas anda dalam format lembar jawaban dengan teliti dan benar
- 2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal ini
- 3. Periksalah naskah soal yang anda terima, apabila halamannya tidak lengkap mintalah pengganti pada pengawas ruang ujian
- 4. Baca dan pahamilah dengan baik pernyataan atau soal sebelum anda menjawab
- 5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan Kepada pengawas ujian
- I. Jawablah soal soal dengan benar, dengan menghitamkan lingkaran () A, B, C, D atau E berikut ini!
- 1. Perhatikan pernyataan berikut:
 - (1) Kekuasaan federative
 - (2) Kekuasaan inspektif
 - (3) Kekuasaan yudikatif
 - (4) Kekuasaan eksekutif
 - (5) Kekuasaan legislatif
 - (6) Kekuasaan konstitutif
 - Dari pernyataan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor
 - A. (1), (2) dan (3)
- D. (4), (5) dan (3)
- B. (2), (5) dan (4)
- E. (5), (6) dan (3)
- C. (3), (5) dan (1)
- Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah

. . . .

- A. Mengusulkan RUU dan RAPBN
- B. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
- C. Mengangkat hakim danjaksa
- D. Mengesahkan RUU menjadi UU
- E. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara
- 3. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan
 - A. Eksekutif
- D. Yudikatif
- B. Konstitutif
- E. Federatif
- C. Legislatif
- 4. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah
 - A. BPK
- D. Bank umum
- B. Bank indonesia
- E. Asuransi
- C. Inspektif

5. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan pelaksanaan dari kekuasaan

A. Federatif

D. Inspektif

B. Konstitutif

E. Yudikatif

- C. Eksaminatif
- 6. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila, kecuali....

A. Keadilan

D. Ketuhanan

B. Kemanusiaan

E. Kemerdekaan

- C. Kerakyatan
- 7. Di bawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, kecuali....
 - A. Bersedia dan siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
 - B. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
 - C. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
 - Menempatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun golongan
 - Ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- 8. Dalam traktat konferensi hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang memiliki lebar....

A. 20 mil

D. 1000 mil

B. 200 mil

E. 10.000 mil

	C. 500 mil			B. Opsi C. Angket	E. Stelselaktif	
9.	Wilayah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun				nerupakan faktor penyebab	
	wilayah tersebut berada diwilayah negara lain disebut wilayah			adalah	warganegaraan sebagai WNI	
	A. Teritorial	D. Res nullis		A. Menikah dengan pria asing		
	B. Eksteritorial	E. Perbatasan		B. Berdomisili di luar negeri		
	C. Res communis			C. Bekerja di luar negeri lebih dari 10 tahun		
					didikan keluar negeri	
10.	Negara Indonesia merupakannegara yang terkenal dengan sebutan (Archipelago) atau negara kepulauan			E. Masuk kedalam o	-	
	terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak			Kasus pembantaian	etnik rohingya di Myanmar oleh	
	A. 250.000pulau D. 16.508 pulau			kaum budha yang ditambah dengan sikap pemerinta		
	B. 17.580pulau	E. 17. 508 pulau		Myanmar yang cen	dereng acuh dan melakukan	
	C. 15.000 pulau			pembiaran merupa	kan merupakan contoh perbuatan	
				yang tidak sesuai de	engan pasal	
11.	Orang yang secara hu	ıkum diakui sebagai bagian dari		A. 27 ayat (1)	D. 29 ayat (2)	
	anggota suatu negara disebut			B. 28 A	E. 30 ayait (1)	
	A. Rakyat			C. 28 D ayat (1)		
	B. Warganegara					
	C. Bukan warganegara		19.	Lembaga yang dibe	ntuk berdasarkan konstitusi/ UUD	
	D. Penduduk			untuk mencapai tuj	uan negara disebut lembaga	
	E. Bukan penduduk			A. Negara	D. Insfrastruktur	
				B. Nasional	E. Independen	
12.	Duta besar dan konsi	ul negara inggris yang		C. Suprastruktur		
	berkedudukan di ibukota Jakarta dan berdomisili					
	secara bertahun-tahun di Indonesia dapat		20.		nerupakan susunan dari lembaga	
	digolongkan sebagai				ebelum amandemen adalah	
	A. Penduduk D. Bukan penduduk			A. MA, MK, preside		
	B. Warganegara E. Bukan warganegara			B. Presiden, DPR, D		
	C. Rakyat			C. BPK, DPR, MA, K	• • •	
				D. Presiden, BPK, D		
13.	Asas penetapan status kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan disebut asas			E. DPR, BPK, DPA, N		
	A. lus solli	D. lus nullius	21.	Lembaga supra struktur politik yang menjalankan		
	B. lus sanguinis	E. Pewarganegaraan		kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah		
	C. lus communis			A. MK D. Jaksa	5 Dames 2245	
1 1	Dalambalnanatanan	status kowarzan azaraan		B. POLRI	E. Pengacara	
14.	Dalamhalpenetapan status kewarganegaraan,			C. KPK		
	Indonesia merupakannegara yang menerapkanasas A. lus solli D. lus nullius		22.	Lembaga politik var	ng dihantuk olah masyarakat atas	
	B. lus sanguinis	E. lus solli dan sanguinis	22.	Lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi		
	C. lus communis	L. lus som dan sangumis			tian dari lembaga	
	c. ras communs			A. Negara	D. Insfrastruktur	
15.	Ariana adalah seoran	ng anak balita yang terlahir di		B. Pemerintah	E. Independen	
13.	negara canada yang menganut asas (ius soli). Ayah			C. Suprastruktur	aopeae	
	ariana adalah seorang warga negara brazil yang			•		
	menganutasas (ius soli) sedangkan ibu ariana		23.	Perhatikan pernyataan di bawah ini:		
	berstatus sebagai warga negara belanda (ius			(1) Parpol		
	sanguinis) dalam kasus tersebut berlaku asas			(2) POLRI		
	A. lussolli D. Multipatride			(3) KPK		
	B. Iussanguinis	E. Apatride		(4) KOMNAS HAM		
	C. Bipatride			(5) ORMAS		
				(6) LSM		
16.	Hakun tuk menolak s	tatus kewarganegaraan disebut				
	hak			Dari peryataan di at	tas yang termasuk dalam lembaga	

insfrastruktur politik ditunjukkan oleh nomer

A. Repudiasi

D. Stelselpasif

A. (1), (2), dan (3) B. (2), (3), dan (4) D. (4), (5), dan (6)	C. (3), (4), dan (5) E. (5), (6), dan (1)	31.	Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden ke MK adalah		
			A. MPR D. KY		
•	amai, perang, mengangkat		B. DPR E. DPA		
	merupakan salah satu tugas		C. MA		
dan wewenang preside	n sebagai kepala				
A. Pemerintahan	D. Federatif	32.	Penyelenggara urusan pemerintahan secara nasional		
B. Negara	E. NKR		yang berkedudukan di ibu kota negara adalah definisi		
C. Eksekutif			dari		
			A. Kementerian pusat		
Lembaga MPR merupak	an lembaga negara yang		B. PERDA		
memiliki jumlah anggot	a sebanyak 692 yang terdiri		C. Lembaga penyelenggara pemerintahan		
dari lembaga			D. Pemerintah pusat		
A. DPR dan DPRD	D. DPR dan DPA		E. Pemerintah daerah		
B. DPR dan BPK	E. MA dan KY				
C. DPR dan DPD		33.	Di bawah ini yang merupakan hubungan antara		
			lembaga MPR dan presiden adalah		
Dalam pasal 22 C UUD I	NRI Tahun 1945, dewan		A. Memberikan pertimbangan dalam pembuatan		
•	D) merupakan lembaga negara		grasi		
·	provinsi dengan cara		B. Mengusulkan calon hakim agung		
	·				
A. Di angkat oleh presid			C. Membasah RUU yang berkenaan dengan otoda		
B. Di usulkan oleh gube	rnur		D. Memberhentikan presiden dan wakil presiden		
C. Pemilihan umum			dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD		
D. Diangkat oleh pemda	1		E. Keduanya memegang kekuasaan kehakiman		
E. Diusulkan MPR					
		34.	Penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah		
	nemiliki tugas dan kewenangan		dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas		
untuk mengadili pada ti	ngkat asasi adalah		pembantuan adalah definisi dari		
A. DPR	D. MK		A. Pemerintah pusat D. Sistemotoda		
B. MPR	E. KY		B. Pemerintah daerah E. Perangkat daerah		
C. MA			C. Perda		
Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan hakim agung, menjaga,			Di bawah ini merupakan urusan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diwakilkan pada pemerintah		
menegakkan kehormata	an dan martabat perilaku		daerah, kecuali		
seorang hakim adalah .			A. Moneterdanfiskal		
A. MAD. DPA			B. Yustisi		
B. MK	E. Presiden		C. Agama		
C. KY			D. Pertahanan dan keamanan		
			E. Administrasi kependudukan		
Di bawah ini lembaga n	egara yang memiliki				
kewenangan untuk mer	nilih 9 orang hakim konstitusi	36.	Di bawah ini merupakan kewenangan pemerintah		
menurut pasal 24 C UU	D NRI Tahun 1945 adalah		pusat dibidang yustisi kecuali		
A. MK, MA dan KY			A. Mendirikan lembaga peradilan		
B. DPR, MPR, danpresid	len		B. Mengangkat hakim		
C. MA, presiden, dan Di	PR		C. Mengangkat jaksa		
D. BPK, DPR, dan MPR			D. Memberikan grasi		
E. MPR, DPR dan DPD			E. Menetapkan kebijakan keamanan nasional		
Di hawah ini merupaka:	n pasal dalam UUD NRI Tahun	37.	Hak wewenang dan kewajihan daerah untuk		
•	·	37.	Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk		
1945 yang menjelaskan	-		mengatur dan mengurus sendiri urusan		
bersidang sedikitnya se			pemerintahanny asesuai kepentingan masayarakat		
tercantum dalam pasal			setempat sesuai denganundang-undang disebut		
A. 2 ayat (1)	D. 22 E		A. Otonomi daerah D. Daerah otonom		
B. 2 ayat (2)	E. 23 A		B. Peraturan daerah E. PERDA		
C. 22 C			C. Pemerintah daerah		

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

38. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah

A. UU No. 26 Tahun 2000

B. UU No. 12 Tahun 2006

C. UU No. 39 Tahun 1999

D. UU No. 28 Tahun 1999

E. UU No. 32 Tahun 2004

39. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahanya merupakan pelaksanaan dari asas

A. Sentralisasi

D. Profesionalitas

B. Desentralisasi

E. Akuntabilitas

C. Tugas pembantuan

- 40. Perhatikanpernyataanberikut:
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan
 - (2) Penyelenggaraan ketertiban
 - (3) Penyelenggaraan pertahanan keamanan
 - (4) Penetapan hari libur keagamaan nasional
 - (5) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan

Dari peryataan di atas yang merupakan kewenangan dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota ditunjukkan pada nomor

A. (1), (2) dan (3)

D. (4), (5) dan (2)

B. (2), (3) dan (4)

E. (5), (2) dan (1)

C. (3), (4) dan (5)

KUNCI JAWABAN SOAL PAS SMP/MTS

Mata P Semes	Pelajaran : PKN ter : 1		Kelas : 2019/2020	х О	
ı.	Kunci Jawaban Piliha	n Ganda			
1.	D	11. B	21. A	31. B	
2.	В	12. E	22. D	32. D	
3.	В	13. B	23. E	33. D	
4.	В	14. E	24. B	34. B	
5.		15. C	25. C	35. E	
6.	E	16. A	26. C	36.	
7.	E	17. E	27. C	37.	
8.	В	18. D	28. C	38. E	
9.	В	19. A	29. C	39.	
10	. E	20. E	30.	40. E	

II. Kunci Jawaban Esay